## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari.(2006). "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)". Simposium Nasional Akuntansi XI, 1–26.
- Arsyad, Lincolin. (1999). Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE Yogyakarta.
- Bangun, Ricky Andra Levy (2009). "Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Perkapita". Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.
- Belajar Melek Anggaran ke Seknas FITRA.www.seknasfitra.org.akses Februari 2014
- Ghozali, Imam, 2011, Aplikasi *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*: Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukrie. (2004). "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali". Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul.(2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta Edisi Revisi: Salemba Empat.
- Harianto, dan Priyo Hari Adi .(2006). "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Perkapita". Skripsi. Saltiga: Fakultas Ekonomi Kristen Satya Wacana.
- Johnson, Cathy Marie. 1994. The Dynamics of Conflict between Bureaucrats and Legislators. Armonk, New York: M.E. Sharpe.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani, 2008, *Akuntansi Sektor Publik : Buku1*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Komposisi APBD di Jateng 2013.www.suaramerdeka.com.akses Januari 2014.
- Kuncoro, Mudrajad. Ph. D. (2004). "Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang". Otonomi dan Pembangunan Daerah": Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo .(2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- McCue, Cliff., Prier, Eric. Using Agency Theory to Model Cooperative Public Purchasing.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009
- Putro, Suratno Nugroho. (2010). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Tehadap Pengalokasian Anggaran Belanjan Modal (study kasus pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah)".Jakarta. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2005. "Suatu Pengantar". Teori Ekonomi Makro: Penerbit FE UI.
- Sanusi, Bachrawi. (2004). Tokoh Pemikir Dalam Mazhab Ekonomi. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. (2006). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simantjuntak, & Bambang Brodjonegoro. (2002). Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Solikin, Ikin. 2007, Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat, http://file.upi.edu/Direktori.
- Sri Rahayu, Ani. (2010). Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiartiana, Iin Indarti. (2012). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode 2005-2009". Jurnal Fokus Ekonomi, Stie Pelita Nusantara Semarang.
- Tuasikal, Askam (2008). "Pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia" Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, Universitas Pattimura Ambon.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah.

## www.depkeu.djpk.go.id

Yustikasari, Yulia dan Darwanto. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi X, 1–25.